

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktor pendorong bangkitnya akuntansi syariah pengembangan lembaga keuangan yang Islam begitu cepat. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut dibarengi dengan adanya tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah.¹ Perintah menunaikan zakat, wajib bagi seseorang telah memenuhi syarat atau sampai batas *nisab* yang dapat dikatakan *muzakki* (wajib berzakat). Sebagaimana yang adiketahui negara Indonesia mayoritas ummat Islam. Maka peran organisasi pengelola zakat sangat dibutuhkan dalam operasional, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang efisien dan efektif.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 29 ayat 3 tentang pengelolaan zakat yang berfungsi melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Rangkaian peraturan dan perundang-undangan tersebut menghendaki pengelola zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.²

Kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaporan terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7 ayat 3 BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan

¹Hadi Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 6. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6297/> (21 Desember 2020).

²Aditya Achmad Fathony dan Ima Fatimah, "Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung," *Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1, Januari-April 2017), h. 12.

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.³

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat suatu standar akuntansi yang sering disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar akuntansi yang digunakan di setiap negara berbeda-beda. Perbedaan standar tiap negara akan menyulitkan para pengguna laporan keuangan yang lingkup kerjanya melewati batas negara.⁴

Ketetapan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam hal penyusunan laporan keuangan zakat, Infaq dan sedekah berupa persyaratan standar akuntansi keuangan no.109 tentang penyajian dana zakat dan bantuan yang sangat vital untuk dilaksanakan dalam rangka fakta bahwa suatu aturan untuk pengenalan ringkasan fiskal, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Karena merupakan tanggung jawab amil terhadap laporan keuangan yang di sajikan.

Dilihat dari observasi awal peneliti mengamati bahwa kurangnya kemampuan sumber daya manusia pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Sehingga setiap organisasi pengelola zakat memiliki laporan keuangan yang berbeda-beda (*heterogen*).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap resmi didirikan pada tanggal 18 Agustus 2018. BAZNAS merupakan salah satu badan amil zakat yang

³Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” dalam *Undang-Undang Pemberdayaan Zakat 2012* (Jakarta: Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia), h. 9.

⁴Wiratna Sujarweni, *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), h.5.

berada dibawah naungan pemerintah. Merujuk pada didirikannya Badan Pengelolah Zakat Kab. Sidrap masih sangat pemula dalam pengelolaan. Tetapi hasil data yang didapatkan pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sedekah setiap tahunnya mengalami peningkatan bahkan *over* target pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar dana yang dikumpulkan dari *muzakki* dan disalurkan kepada *mustahiq*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian analisis penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Sidrap yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pengakuan dan pengukuran laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang?
2. Untuk mengetahui bagaimana penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara :

1. Manfaat Teoretis

Dalam kajian ini ingin menambah tentang penggunaan representasi akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109. Bagi peneliti selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif dan salah satu referensi sesuai syariah saat ini.

2. Manfaat Praktis

Bagi institusi yang terkait penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan pada suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan laporan keuangan yang dapat mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel serta berkualitas.